

## **BAB II**

### **ROHINGYA DAN DAW AUNG SAN SUU KYI**

Rohingya menurut PBB dianggap sebagai etnis paling teraniaya karena tidak jelasnya status kewarganegaraan serta perlakuan kejam militer Myanmar (CNN, 2018). Negara Myanmar masih tidak mau mengakui penduduk etnis Rohingya sebagai salah satu warga negaranya. Parahnya lagi, etnis Rohingya harus merasakan penderitaan dengan pelanggaran HAM berat. Disisi lain, Myanmar yang dahulu dikuasai oleh rezim militer kini sudah dipimpin oleh sipil bernama Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi menjadi ikon demokrasi dan HAM setelah perjuangannya melawan rezim militer. Dengan dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, lantas tidak membuat etnis Rohingya masih merasakan hidup dengan nyaman.

#### **2.1 Sejarah etnis Rohingya**

Rohingya adalah etnis yang menempati wilayah Rakhine (Arakan), Myanmar. Keberadaannya sebagai etnis asli Myanmar, hingga saat ini masih diperdebatkan. Pemerintah Myanmar menolak menyebutnya sebagai etnis asli Myanmar. Secara resmi pun sejak tahun 1988 Myanmar hanya mengakui 135 etnis yang berada di dalam negaranya (Mahmood, 2017:2). Sayangnya dari banyaknya etnis yang diakui, tidak termasuk etnis Rohingya. Etnis tersebut sering dianggap sebagai etnis pendatang dengan sebutan Bengalis. Istilah Bengalis disematkan sebagai upaya penolakan keberadaan Rohingya sebagai penduduk asli Myanmar. Padahal keberadaannya sudah hadir semenjak era sebelum penjajahan. Bahkan sempat ditahun 1958 etnis tersebut diakui oleh pemerintah setempat (Mahmood, 2017:3).

Pada masa sebelum penjajahan Inggris, wilayah Rakhine diketahui masih berbentuk kerajaan serta lebih dikenal dengan nama Arakan. Pengaruh identitas muslim sudah dapat dirasakan ketika Kerajaan Arakan berkuasa. Muslim pertama kali menginjakkan kaki di Arakan sekitar abad ke-8 (Mohajan, 2018:10). Ibu Kota Arakan bernama Mrauk U menjadi saksi dimana terjadi perdagangan dengan pedagang muslim. Setelah itu imigran muslim secara perlahan datang dan kemudian berintegrasi dengan baik di wilayah Arakan. Lalu, kemudian semenjak kedatangan

Inggris ke Arakan terjadi migrasi besar-besaran dari Bengal, Bangladesh. Alasan datangnya warga Bengal ke Rakhine karena para pekerja lokal Myanmar tidak mampu memenuhi permintaan tenaga kerja dari Inggris, sehingga akhirnya Inggris mendorong orang Bengal bekerja di Rakhine. Populasi muslim yang tinggal di wilayah Rakhine tersebut lalu berintegrasi dengan populasi muslim yang sebelumnya telah tinggal di wilayah tersebut sehingga jumlah populasi muslim pun bertambah banyak.

Memasuki masa perang dunia ke-2, Myanmar terkena dampak perang yang menyebabkan Inggris dan Jepang berupaya mendekati masing-masing etnis di Myanmar agar dapat memaksimalkan kekuasaan. Inggris dekat dengan etnis minoritas, seperti Rohingya sedangkan Jepang memiliki pendukung etnis Burma dan Rakhine yang merupakan nasionalis Myanmar yang beragama budha. Inggris menjanjikan kepada Rohingya, Muslim National Area asalkan mereka mampu mengusir Jepang dari wilayah Rakhine (Daily Sabah, 2017). Para buddhis yang mengetahui hal tersebut kemudian merasa terancam daerahnya akan diambil alih etnis Rohingya. Perbedaan aliansi tersebut menjadi salah satu sebab dasar permusuhan diantara etnis Rohingnya dan Rakhine (Green, 2015:28). Namun, janji Inggris untuk memberikan daerah otonomi kepada Rohingya tidak dapat dipenuhi karena pada saat itu Myanmar dengan segera memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1948.

Kemerdekaan yang diperoleh Myanmar tidak membuat etnis Rohingya menjadi salah satu etnis yang diakui pemerintah Myanmar. Namun dibawah *Citizenship Law* 1948, etnis rohingya masih dibolehkan untuk tinggal dan diberi identitas setelah setidaknya tinggal selama dua generasi. Bahkan selama periode waktu tersebut, orang-orang Rohingya juga bekerja di parlemen Myanmar Etnis (Aljazeera, 2018). Rohingya mulai terlihat mendapatkan diskriminasi secara keras ketika pemerintahan Ne Win pada tahun 1962 yang menerapkan sistem diktaktor. Pernah ditahun 1977, pemerintah melakukan operasi Nagamin yang menyebabkan 200.000 etnis Rohingya mengungsi ke Bangladesh karena tindak kekerasan yang dilakukan tentara Myanmar (Wall Street Journal, 2016). Ditambah pemberlakuan *Citizenship Law* 1982 membuat Rohingya kehilangan haknya untuk menjadi warga

negara Myanmar. Undang-undang tersebut, berusaha menghapuskan status kewarganegaraan kepada penduduk yang bukan berasal daftar etnis group yang diakui Myanmar di 1982 (Arriza, 2017:1).

Berdasarkan *Citizenship Law* 1982, terdapat tiga kategori warga negara Myanmar (Human Right Watch, 2000). Yang pertama adalah kewarganegaraan penuh yaitu mereka yang termasuk etnis yang telah diakui negara Myanmar seperti Kachin, Kayah, Karen, Chin, Burman, Mon, Rakhine, Shan, Kaman, dan Zerbadee. Sedangkan yang kedua adalah *associated citizenship*, adalah seseorang yang sudah pernah mendapatkan kewarganegaraan melalui *Union Citizenship law* 1948, kemudian telah mendaftarkan ulang kembali sebelum *pemberlakuan Union Citizenship law* 1982. Ketiga, merupakan warga naturalisasi yang mengacu kepada seseorang yang telah memiliki orang tua atau garis keturunan sebelum 1948 telah tinggal dan memiliki bukti lengkap. Selain itu apabila seseorang mau dianggap sebagai warga negara Myanmar harus dapat berbahasa nasional Myanmar (Human Right Watch, 2000).

Dengan berlakunya undang-undang tersebut, etnis Rohingya kehilangan kesempatan untuk menjadi warga negara Myanmar. Meskipun sejarah membuktikan, etnis Rohingya sudah berada sebelum abad ke-8, sayangnya etnis tersebut tidak termasuk daftar etnis yang diakui oleh pemerintah Myanmar. Dokumen bukti yang menunjukkan kependudukan mereka sebelum 1823 juga sulit ditemukan, karena memang pada jaman dahulu tidak terdapat sistem arsip seperti foto atau kartu keluarga yang menyulitkan mereka mencari sejarah garis keturunan yang dapat membawa etnis Rohingya mendapat pengakuan kewarganegaraan (Human Right Watch, 2000). Akibat tidak memiliki status legal sebagai penduduk resmi Myanmar, etnis Rohingya pun tidak mendapatkan hak-hak dasar sebagai warga negara. Kebebasan berpindah tempat, akses pendidikan, kepemilikan properti tidak dapat mereka nikmati. Ketiadaan fasilitas yang menjamin kehidupan etnis Rohingya kemudian memicu pergerakan etnis Rohingya untuk memulai mencari suaka.

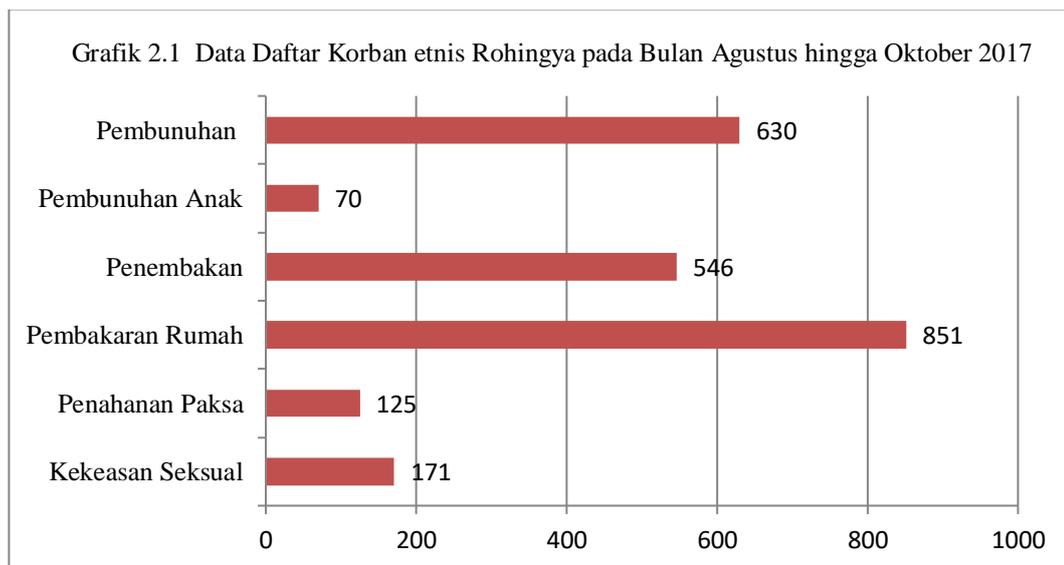
## 2.2 Kejahatan dan Krisis Kemanusiaan Rohingya di Rakhine

Kekejaman yang diterima etnis Rohingya telah diketahui oleh dunia internasional. Amnesty Internasional telah menetapkan apabila kejahatan terhadap kemanusiaan telah terjadi di Myanmar (Amnesti Internasional, 2018). Bukti apabila terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut, diambil dari narasumber masyarakat yang berada dalam tempat pengungsian di Bangladesh dan beberapa orang yang berada di Rakhine. Organisasi Amnesty Internasional menetapkan apabila militer Myanmar melakukan 6 dari 11 tipe kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan yang dilakukan diantaranya, adalah pembunuhan, deportasi dan pemindahan paksa, penyiksaan, pemerkosaan dan kekerasan seksual, persekusi, serta perlakuan tidak berperikemanusiaan lainnya seperti tidak memberi pangan dan bahan pokok untuk hidup (Amnesti Internasional, 2017).

Militer Myanmar telah melakukan kejahatan serius dengan *Commander in Chief Min Aung Hlaing* dianggap sebagai salah satu orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya (CNN, 2018) Petinggi militer di Myanmar, Hlaing mengatakan apabila etnis Rohingya tidak memiliki karakteristik yang sama dengan etnis di Myanmar (Detik News, 2018). Selain itu penyebab tensi yang tinggi diantara Myanmar dan Rohingya adalah karena desakan etnis Rohingya yang selalu meminta status kewarganegaraan.

*Cleaning operation* adalah operasi yang dilakukan militer Myanmar tujuannya guna pemberantasan ARSA yang mengancam keamanan Myanmar tetapi malah digunakan sebagai alat untuk melakukan kekerasan kepada seluruh masyarakat sipil Rohingya, sehingga hal tersebut dengan jelas merujuk pada pelanggaran Statuta Roma artikel 7. Dalam Statuta Roma dikatakan apabila serangan secara sistematis atau menyebar yang dilakukan kepada masyarakat sipil merupakan tindak kejahatan terhadap kemanusiaan (Legal UN). Serangan yang sistematis dapat dilihat dari kejahatan yang diterima etnis Rohingya sudah direncanakan yang diberi nama *cleaning operations*. Serangan yang dilakukan juga sifatnya menyebar ke seluruh penjuru Rakhine yang dihuni oleh etnis Rohingya. Pelanggaran yang dilakukan puncaknya terjadi setelah serangan yang dilakukan oleh ARSA kepada aparat Myanmar pada Agustus 2017 lalu. Kejahatan yang

terjadi di Rakhine Utara kemudian terjadi terus menerus dan serentak kepada etnis Rohingya (Amnesti Internasional, 2018). Berbagai jenis kejahatan yang termasuk ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan terjadi pada etnis Rohingya. Berdasarkan data pada grafik 2.1 etnis Rohingya mengalami beberapa tipe insiden kejahatan yang paling sering diterima, yaitu:



Sumber: Diolah dari The Rohingya Survey (Xchange.org, 2017)

Jumlah tersebut diambil dari kesaksian masyarakat atas *cleaning operations* yang dilakukan pada Agustus hingga Oktober 2017. Jumlah insiden yang paling banyak terjadi adalah pembakaran rumah, sebanyak 851 pemukiman terbakar. Sehingga membuat ribuan orang mengungsi ke wilayah baru. Terbukti dengan jumlah yang signifikan sebanyak 723.000 etnis Rohingya melarikan diri ke Bangladesh pada tahun 2017 (UNHCR, 2019). Meskipun pembakaran rumah tidak secara eksplisit sebagai salah satu tipe kejahatan terhadap kemanusiaan, namun dari tujuannya untuk melakukan pemindahan secara paksa merupakan bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Kemudian berdasarkan data diatas diketahui ternyata pembunuhan terhadap anak terjadi namun dengan presentase yang paling rendah diantara insiden yang lainnya.

Pembunuhan yang disengaja kepada masyarakat sipil tertera dalam poin pertama kejahatan terhadap kemanusiaan (Legal UN, nd). Dalam beberapa hari setelah penyerangan yang dilakukan ARSA, *Myanmar Security Forces* secara

membabi buta melakukan pengepungan ke desa di Rakhine Utara yang berisikan non-etnis Rohingya dan Rohingya. Masyarakat Rohingya yang terdiri dari wanita, anak-anak dan laki-laki semuanya kabur dari rumah mereka karena tentara dan polisi menembaki, akibat peristiwa itu tidak sedikit yang tewas serta setidaknya total 100 orang terluka (Amnesti International, 2017:9). Penembakan secara membabi-butu menjadi cara paling sering ditemui untuk membunuh masyarakat sipil Rohingya. Penembakan terjadi di wilayah Chein Kar dengan membunuh kurang lebih 29 masyarakat Rohingya (Amnesti International, 2017:11).

Ketika terjadi penembakan, banyak warga yang kemudian bersembunyi di bukit dekat desa Chein Kar, mereka yang tidak sempat menyelamatkan diri akhirnya menjadi korban kekejaman tentara Myanmar. Sedangkan daerah Koe Tan Kauk menelan 37 korban tidak bersalah yang berasal dari masyarakat sipil (Amnesti International, 2017:12). Saksi mata mengatakan apabila aparat yang telah melakukan perlakuan tidak manusiawi tersebut menggunakan seragam berwarna hijau dengan patch berbentuk seperti bunga mawar. Daerah Chut Pyin di Rakhine Utara juga tidak lepas dari insiden penembakan yang dilakukan tentara Myanmar. Kemudian daerah bernama Inn Dinn juga dilaporkan terjadi penembakan massal masyarakat sipil Rohingya, namun Amnesti Internasional tidak mengetahui jumlah korban secara pasti. Tetapi melalui wawancara dari masyarakat desa Inn Dinn yang berada di pengungsian, setidaknya 5 warga telah tewas ditangan militer Myanmar (Amnesti International, 2017:19).

Lalu, yang perlu disoroti adalah peristiwa pembakaran yang menyebabkan masyarakat kehilangan tempat tinggalnya. Pembakaran rumah dan lahan menjadi cara ampuh untuk menggiring etnis Rohingya keluar dari Myanmar. Dilihat dari satelit, cukup jelas terlihat kerusakan akibat kebakaran di wilayah Rakhine. Saksi mata bernama Maung Hnit Ma Gyi mengatakan jika polisi dan beberapa warga buddhis datang ke desanya yang kemudian secara sistematis mulai membakar bangunan-bangunan desa (Amnesti International, 2017:19). Kerusakan besar akibat pembakaran bangunan dan lahan dapat dilihat dalam gambar 2.1 :

Gambar 2.1 Kebakaran pada salah satu desa yang dihuni oleh etnis Rohingya yang diambil dari satelit



Sumber: USG, NextView Licence dalam Amnesti Internasional, 2017

Dari gambar 2.1 terlihat penampakan gambar sebelum dan sesudah kejadian yang memperlihatkan pemukiman warga menjadi menjadi rata dengan tanah dan warnanya berubah menjadi agak kehitaman akibat dari pembakaran yang dilakukan oleh pihak militer Myanmar. Pembakaran rumah tersebut sukses untuk menggiring etnis Rohingya pergi ke luar wilayah Myanmar.

Selain menggunakan cara pembakaran rumah dan lahan, upaya deportasi atau pemaksaan untuk berpindah tempat keluar wilayah Myanmar seperti peletakan granat menjadi pelengkap kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan tentara Myanmar. Granat diletakan di titik-titik tertentu terutama di wilayah perbatasan Bangladesh dan Myanmar sehingga menyulitkan etnis Rohingya untuk kembali ke Myanmar. Setidaknya 12 orang dicatat telah meninggal akibat ledakan granat yang ditanam (Amnesti International, 2018:98). Selain itu, penyitaan kepemilikan tanah milik masyarakat Rohingya membuat mereka terusir secara perlahan.

Adanya wabah kelaparan juga sengaja diperbuat oleh para aparat yang menginginkan etnis Rohingya keluar dari Myanmar. Hal tersebut terjadi setelah peristiwa kerusuhan yang disebabkan oleh tentara Myanmar yang memasuki desa

etnis Rohingya, banyak masyarakat yang kabur namun banyak juga yang bertahan hidup di Rakhine Utara. Para penduduk yang masih bertahan di Rakhine Utara menderita banyak yang malnutrisi karena sistem diskriminasi yang telah diciptakan yang membatasi mereka untuk mendapatkan akses makanan bahkan air bersih sulit untuk didapatkan (Amnesti International, 2018:101).

Pada awalnya penduduk yang bertahan masih dapat bertahan dengan persediaan makanan yang ada, namun sebulan setelahnya mereka mulai kesulitan mencari bahan pangan. Segala cara digunakan untuk bertahan hidup, selain dari pangan darat beberapa dari penduduk mencari makanan dengan memancing. Sayangnya kapal-kapal pancing mereka tidak luput dari sasaran aparat. Ketika memancing, pernah etnis Rohingya dianggap melewati batas perairan, sehingga kapal mereka dirampas. Tanah untuk mengolah padi pun diambil alih oleh para militer, penduduk rohingya tidak diperbolehkan menanam padi ditanah miliknya.

Bahan-bahan makan yang sebelumnya disimpan serta ternak yang dipelihara dengan sengajaa dicuri oleh para militer dan etnis Rakhine. Penyelidikan yang dilakukan oleh amnesti, melaporkan apabila hasil curian ternak milik etnis Rohingya dijual kepada pebisnis lokal dengan harga 200 dollar Amerika setiap ekornya (Amnesti International, 2018:104). Bantuan internasional tidak luput disorot dari mata para militer Myanmar, mereka membatasi bantuan yang masuk kedalam Rakhine. Pembatasan tersebut terjadi akibat otoritas Myanmar menduga ARSA bertahan hidup pula dengan bantuan yang diberikan internasional. Adanya biskuit dari program bantuan internasional yang ditemukan di markas mereka membuat militer Myanmar semakin mengetatkan bantuan asing yang masuk. Blokade bantuan ini mencapai puncaknya setelah Agustus, yakni semua bantuan yang berasal dari luar negara dilarang total. Barulah setelah mendapat tekanan internasional, Myanmar menyatakan akan mengirimkan bantuan dipimpin oleh palang merah Myanmar yang didukung oleh palang merah internasional. Kelaparan yang melanda etnis Rohingya menjadi penyebab utama mereka kabur ke Bangladesh (Amnesti International, 2018:108).

Kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi lainnya adalah penahanan, penyiksaan dan penghilangan secara paksa (Amnesti International, 2018:25). Penahanan terjadi pada berbagai wilayah di Rakhine Utara, misalnya daerah Rathedaung dan Buthidaung. Alasan penangkapan tersebut dikarenakan aktivitas ARSA yang makin aktif terlihat di wilayah Rakhine Utara. Masyarakat sipil Rohingya kemudian banyak yang ditangkap untuk memberantas para pendukung ARSA. Padahal kenyataannya, beberapa etnis Rohingya bahkan dibunuh oleh ARSA karena memberikan informasi kepada pemerintah. Jadi disini jelas tidak semua etnis Rohingya berhubungan dengan ARSA, namun sikap tentara Myanmar malah sewenang-wenang dalam melakukan penahanan, dan jelas tindakan tersebut melanggar hak

Penyiksaan yang terjadi dilakukan selama masa penahanan, ketika dilakukan proses interogasi aparat Myanmar tak ragu untuk melakukan tindakan kekerasan. Hal yang dilakukan misalnya, pemukulan, pembakaran anggota tubuh, bahkan mereka tega untuk memotong alat kelamin tahanan (Amnesti International, 2018:31). Semua dilakukan demi memperoleh informasi mengenai ARSA. Setelah ditahan, mereka dikirimkan ke penjara Buthidaung atau Sittwe. Dalam wawancara yang diperoleh dari mantan tahanan yang telah dilepaskan, Zay Di Pyin mengatakan :

*“Dalam tahanan, BGP mulai menyiksa kami secara brutal. Saa kehilangan kesadaran. Segera setelah saya bangun, saya menyadari kaki saa terbakar dan berdarah. Saya memiliki bekas luka di kaki saya. Bekasnya seperti luka yang dibakar dengan korek api.”* (Amnesti International, 2018:31).

Sementara itu penghilangan secara paksa juga dialami oleh etnis Rohingya. Keluarga para korban tidak diberikan informasi mengenai keberadaan para tahanan, akankah mereka masih hidup atau sudah meninggal, namun mayoritas adalah hilang tanpa kabar apapun. Apabila para tahanan diadili, hal tersebut sangat dikhawatirkan mereka tidak punya kesempatan untuk membela diri kemudian berujung pada hukuman yang tidak beradab.

Pemeriksaan menjadi daftar kejahatan kemanusiaan selanjutnya yang dilakukan oleh militer Myanmar. Dalam konflik yang tengah terjadi, wanita menjadi korban yang merasakan penderitaan luar biasa secara mental dan fisik.

Agak sulit untuk mengetahui besarnya skala pemerkosaan dan kekerasan seksual yang telah terjadi karena peristiwa tersebut tabu untuk di ungkapkan. Tempat pengungsian etnis Rohingya di Cox, Bangladesh mengungkap apabila banyak pengungsi yang dirawat karena kekerasan seksual yang telah diterimanya. Dari data yang telah didapatkan Amnesty Internasional, mendapatkan fakta apabila perempuan yang diperkosa berada menyebar pada 16 lokasi yang berbeda (Amnesty International, 2018:89).

Terdapat tiga skenario terjadinya pemerkosaan, yang pertama ketika para aparat militer melakukan serangan di desa etnis Rohingya. Biasanya, para aparat memisahkan antara laki-laki dan perempuan, kemudian perempuan digiring ke suatu tempat bangunan. Pada saat itulah terjadi tindak pemerkosaan dan kekerasan seksual. Kedua, ketika para aparat sedang mencari militan ARSA di rumah-rumah penduduk, para perempuan pun diperkosa dirumah mereka sendiri. Ketiga, ketika sedang berupaya melarikan diri dari Rakhine menuju Bangladesh, mereka menjadi subjek kekerasan seksual.

Penderitaan yang telah diterima tersebut dengan segera menimbulkan krisis kemanusiaan. Indikator disebabkan krisis kemanusiaan Rohingya, utamanya karena terdapat pelanggaran HAM berat yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan. Selain itu indikator lain adalah kemiskinan etnis Rohingya karena diskriminasi tidak diberikan akses layaknya masyarakat lain oleh pemerintah Myanmar. Penduduk di Rakhine menempati tingkat kemiskinan 78% (Tempo, 2018). Kekurangan bahan makanan dapat diketahui dari wabah kelaparan yang melanda etnis Rohingya seperti penjelasan sebelumnya. Sehingga hal tersebut sesuai dengan indikator penyebab dalam krisis kemanusiaan (Canadas Francesch et all, 2010: 111). Hingga 2018 total korban meninggal diperkirakan sekitar 25.000 orang (The Daily Star, 2018). Sedangkan pengungsi mencapai 910.000 orang tercatat oleh UNHCR pada tahun 2019. Korban meninggal dan pengungsi dengan skala yang besar, serta indikator yang telah disebutkan membuat kekerasan etnis Rohingya menjadi sebuah krisis kemanusiaan yang terjadi di era global.

Kejahatan dan krisis kemanusiaan yang dirasakan oleh etnis Rohingya mengundang perhatian internasional. Aung San Suu Kyi sebagai pemimpin *de facto* Myanmar disorot, karena Aung San Suu Kyi dianggap sebagai ikon demokrasi dan pejuang HAM serta peraih nobel perdamaian internasional. Perolehan nobel perdamaian internasional dicapai dengan upaya-upaa penegakan HAM yang dilakukan oleh Aung San Suu Kyi.

### **2.3 Daw Aung San Suu Kyi dalam Perolehan Nobel Perdamaian Internasional**

Nobel perdamaian internasional menjadi salah satu penghargaan paling bergengsi di dunia. Orang-orang tidak bisa mendapatkannya dengan sembarangan karena pemilihan dilakukan secara ketat oleh tim khusus. Nobel perdamaian internasional ini adalah bagian dari kategori penghargaan nobel internasional. Sebenarnya dalam penghargaan nobel internasional, terdapat 6 kategori yang terdiri dari, penghargaan fisika, penghargaan kimia, penghargaan obat-obatan, penghargaan literatur, penghargaan perdamaian, serta penghargaan ekonomi (Nobel Peace Prize Organization, 2019). Nobel penghargaan tersebut, dilatar belakangi oleh seorang tokoh bernama Alfred Nobel yang merupakan pebisnis dengan kekayaan yang melimpah. Sebelum Nobel meninggal, dia meninggalkan pesan untuk menyumbangkan harta nya kepada orang-orang yang memberikan perubahan kepada dunia.

Pemberian penghargaan nobel perdamaian internasional telah diberikan sebanyak 99 kali semenjak 1901 (Nobel Peace Prize Organization, 2019). Salah satu penerima nobel perdamaian internasional yang cukup terkemuka adalah Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi menerima penghargaan tersebut ketika sedang menjalani masa tahanan ruma pada tahun 1991. Wanita kelahiran Myanmar tersebut mendapatkan penghargaan nobel perdamaian internasional atas perjuangannya dalam “*non-violent struggle for democracy and human rights*”. Usahnya untuk membawa Myanmar menjadi negara demokratis berbuah manis karena sekarang negara tersebut perlahan menjadi negara demokrasi yang sebelumnya dikuasai oleh rezim diktaktor. Melalui kemenangannya dalam nobel perdamaian

internasional, Aung San Suu Kyi dikenal sebagai simbol penting perjuangan melawan penindasan (Nobel Peace Prize Organization, 2019).

Aung San Suu Kyi memulai perjuangannya untuk menjadikan Myanmar terbebas dari segala bentuk penindasan pada tahun 1988 ketika kembali dari Inggris (Echo Foundation, 2012:39). Aung San Suu Kyi berada di luar negeri semenjak ibunya ditugaskan untuk menjadi duta besar Myanmar untuk India sekitar tahun 1960 (Echo Foundation, 2012:38). Tujuan utamanya kembali ke Myanmar di tahun 1988 bukanlah mencampuri urusan politik Myanmar namun untuk merawat ibunya yang sakit stroke. Tetapi ketika tiba kembali ke Myanmar, Aung San Suu Kyi merasakan situasi yang berbeda terjadi di negaranya sehingga akhirnya dirinya pun bertekad untuk memperjuangkan perubahan Myanmar menjadi negara demokratis.

Sebagai anak dari pahlawan nasional Myanmar, Aung San Suu Kyi tidak dapat melawan takdirnya untuk memperjuangkan demokrasi di Myanmar (Suu Kyi, 2010:204). Ditambah kejadian pada akhir Agustus telah terjadi pembantaian dari para demonstran yang menginginkan perubahan pada negara Myanmar. Pelanggaran hak asasi manusia tersebut makin mendorong Aung San Suu Kyi untuk terlibat langsung dalam pergerakan Myanmar menuju negara demokratis. Berdasarkan biografi yang ditulisnya sendiri, Aung San Suu Kyi mengakui itu adalah tanggung jawabnya kepada negara Myanmar (Kyi, 2010:204). Semenjak berusia anak-anak, Aung San Suu Kyi sudah diajari nilai-nilai kemanusiaan oleh ibunya. Ketika kuliah Aung San Suu Kyi mulai tertarik dengan dunia politik, terbukti dalam tulisan yang dibuatnya dengan judul “*What is Democracy*”. Aung San Suu Kyi juga mempelajari ajaran Mohandas Gandhi yang menggunakan perlawanan pasif untuk mencapai tujuan (Pederson, 2016:163).

Melihat sejarah, Myanmar semenjak tahun 1962 menjadi negara yang tertutup akibat pemerintahan diktator Ne Win. Negara tersebut hanya memperbolehkan satu jenis partai politik yaitu Sosialis Burma. Dengan berkuasanya rezim Ne Win, Myanmar melakukan politik isolasi yang tidak membuat Myanmar berkembang menjadi negara makmur. Hingga pada akhirnya tahun 1987 terjadi krisis di Myanmar dengan menurunnya nilai mata uang mereka

dan 1988 bulan Agustus tanggal 8 terjadi demonstrasi besar-besaran oleh para masyarakat dari segala kalangan bahkan anak-anak pun mengikuti demo di Yangon. Naas malah terjadi pembantaian yang mengakibatkan 10.000 demonstran meninggal dunia Myanmar (Echo Foundation, 2012:17).

Bersamaan setelah peristiwa tersebut, Aung San Suu Kyi mulai melakukan perjuangan demi terbentuk negara demokrasi. Kemunculannya di publik pertama kali pada tanggal 24 Agustus 1988 di rumah sakit Yangon (Kyi, 2010:193). Tujuan utamanya untuk hadir di publik pada saat itu hanya untuk mengumumkan apabila Aung San Suu Kyi akan menghimpun masyarakat untuk bersatu melawan penindasan. Selang dua hari kemudian, Aung San Suu Kyi melakukan perjuangan sesungguhnya dengan berpidato di Pagoda Shwedagon. Pidato tersebut dihadiri oleh ribuan orang yang mengidamkan perubahan, disitu para biksu juga hadir untuk mendengarkan pidato Aung San Suu Kyi.

Dalam pidatonya di Pagoda Shwedagon, Aung San Suu Kyi berusaha meyakinkan segala keraguan dalam benak masyarakat tentang dirinya yang telah lama berada di luar negeri. Banyak yang khawatir Aung San Suu Kyi tidak mengerti segala urusan perpolitikan Myanmar, namun hal tersebut ditepis Aung San Suu Kyi. Dia juga menjelaskan apabila sesungguhnya ingin menjauh dari urusan politik, tetapi krisis yang terjadi membuatnya harus bertindak (Kyi, 2010:193). Disebutkan apabila demokrasi adalah satu-satunya ideologi yang konsisten menjalankan kebebasan.

Permusuhan antara militer Myanmar dan masyarakat sipil juga disinggung oleh Aung San Suu Kyi. Para masyarakat didorong oleh Aung San Suu Kyi untuk tidak membenci para militer Myanmar. Para militer disebutkan sebagai bagian dari negara Myanmar, dan seharusnya bersatu bukan malah bermusuhan. Pesan yang disampaikan Aung San Suu Kyi tersebut bernilai perdamaian dan sama sekali tidak menjelekan militer Myanmar, padahal militer Myanmar dibawah Ne Win telah banyak melakukan pelanggaran.

Tak hanya berjuang dengan cara melakukan pidato ke penjuru daerah Myanmar, Aung San Suu Kyi juga sempat dua kali mengirimkan surat ke Amnesti

Internasional untuk menyorot kasus di negaranya. Surat yang pertama bertanggal 24 September 1988 yang intinya Aung San Suu Kyi mendorong Amnesti Internasional untuk mengikut sertakan topik pelanggaran HAM di Myanmar pada debat umum di PBB (Kyi, 2010:209). Yang kedua yaitu surat pada tanggal 16 Oktober 1988 ditulis Aung San Suu Kyi mengenai pelanggaran HAM yang terjadi pada 15 Oktober dengan peristiwa ribuan orang ditarik secara paksa oleh militer ketika sedang bersantai di *tea-shop*.

Banyak yang mempercayai penangkapan secara paksa tersebut guna menambah personel militer guna mendeteksi adanya ranjau darat. Hal tersebut dibutuhkan karena militer Myanmar kekurangan detektor ranjau, sehingga masyarakat sipil akhirnya diperbudak untuk mencari ranjau-ranjau tersembunyi yang masih aktif. Dengan peristiwa tersebut, Aung San Suu Kyi memohon Amnesti Internasional agar memberikan perhatian pada pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar. Selain mengirimkan surat kepada Amnesti, duta besar yang berada di Myanmar juga dikirim surat mengenai pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar dan mendorong negara-negara tersebut membahas pelanggaran tersebut dalam debat umum PBB yang akan terselenggara di New York 1988. Surat terbuka kepada PBB juga tidak lupa dibuat demi memperjuangkan keadilan atas penindasan yang telah terjadi.

Kemudian sebelum Aung San Suu Kyi ditangkap untuk dipenjara, dirinya sempat melakukan pidato di Kachin pada tanggal 27 April 1989. Pada pidatonya kali ini, Aung San Suu Kyi menekankan pada solidaritas keberagaman etnis di Myanmar. Rasa simpati dan sikap saling pengertian dibutuhkan untuk membangun solidaritas yang kuat. Lagi-lagi dalam pidatonya Aung San Suu Kyi tidak menyalahkan partai sosialis Myanmar yang telah lama berkuasa atas keterpurukan negara tersebut. Aung San Suu Kyi malah mengatakan apabila rasa takut dalam diri masyarakat yang menjadikan Myanmar tidak kunjung berkembang. Aung San Suu Kyi menyebut apabila bukanlah tugas masyarakat untuk melawan dengan kekerasan. Ditambahkan dalam pidatonya yaitu agar masing-masing etnis tidak menyebutkan dirinya sendiri sebagai bagian dari etnis nya sendiri-sendiri. Untuk mencapai tujuan demokrasi Myanmar, seluruh elemen masyarakat harus bersatu.

Apabila masih ada pertikaian antar etnis, maka pencapaian demokrasi akan sulit untuk diraih (Suu Kyi, 2010:219).

Perjuangannya untuk mencapai demokrasi tanpa menggunakan kekerasan telah membawanya kepada kemenangan nobel perdamaian internasional tahun 1991. Inspirasi dari Ayahnya, Aung San dan kekuatan dari Mohandas Gandhi mampu menumbuhkan jiwa yang kuat serta tekad berani Aung San Suu Kyi menumpas segala penindasan di Myanmar. Sayangnya perjalanan Aung San Suu Kyi tidak mudah karena pada tahun 1989, Aung San Suu Kyi menjadi tahanan rumah akibat aksinya yang berani melawan penindasan yang terjadi. Ketika pengumuman pemenang nobel, Aung San Suu Kyi pun tidak dapat hadir karena sedang menjalani masa tahanan, lalu akhirnya diwakilkan oleh suaminya yaitu Michael Aris.

Setelah kurang lebih 20 tahun menjadi tahanan rumah hingga akhirnya Aung San Suu Kyi bebas, dan menjadi pemimpin Myanmar. Dunia internasional, khususnya masyarakat Myanmar berharap agar Aung San Suu Kyi dapat memperbaiki kondisi penegakan HAM di negara tersebut. Sayangnya dalam menghadapi krisis kemanusiaan Rohingya malah muncul antagonisme pada perilakunya

#### **2.4 Antagonisme Daw Aung San Suu Kyi dalam Krisis Kemanusiaan Rohingya**

Penindasan masih berlangsung ketika Aung San Suu Kyi menjabat sebagai pemimpin Myanmar. Dilansir dari CNBC, menyebutkan di tahun 2018 Myanmar termasuk dalam peringkat 10 besar negara yang mudah ditemui tindak pelanggaran HAM (CNBC, 2018). Kemudian, berdasarkan World Justice Project yang menilai segala aspek dari hak dasar manusia, keamanan, keadilan, kekuatan dan keterbukaan pemerintahan negara Myanmar mengalami kemerosotan yaitu turun 2 peringkat dari posisi sebelumnya pada tahun 2018 (World Justice Project Team, 2018:115). Turunnya peringkat tersebut besar disebabkan oleh faktor terjadinya peristiwa kejahatan terhadap kemanusiaan di Rakhine yang diterima oleh etnis Rohingya.

Banyak pihak yang menyayangkan sikap dari Aung San Suu Kyi. Sebagian besar mengutuk Aung San Suu Kyi atas segala sikapnya yang tidak sesuai harapan masyarakat internasional untuk membantu mengatasi krisis kemanusiaan yang terjadi. Sekretaris Jenderal Amnesty Internasional mengungkapkan kekecewaannya kepada Aung San Suu Kyi dengan pernyataannya yaitu, “*Hari ini saya sangat kecewa bahwa anda tidak lagi mewakili simbol harapan, keberanian dan pertahanan hak asasi manusia yang abadi*” (Amnesty International, 2018). Sempat pula timbul wacana untuk mencabut gelar nobel perdamaian 1991 yang telah diperolehnya, akan tetapi hal tersebut tidak jadi dilakukan dengan alasan tidak adanya aturan yang mengatur mengenai penarikan hadiah nobel (CNN, 2018). Salah satu mantan peraih nobel perdamaian internasional di tahun 1984, Pendeta Desmond Tutu bahkan mengirim surat kepada Aung San Suu Kyi karena merasa yang dilakukan Aung San Suu Kyi tidaklah benar (The Guardian, 2017).

Di tengah panasnya konflik yang terjadi, Aung San Suu Kyi malah mengambil keputusan untuk bersikap pasif seakan menutup mata dan telinga terhadap kekerasan yang diterima oleh etnis Rohingya. Keterbukaan penerimaan bantuan luar negeri untuk korban etnis Rohingya pun harus menggunakan upaya dialog dengan negara lain, bukan atas inisiatif Aung San Suu Kyi. Upaya menutupi konflik juga dilakukan ketika diwawancarai oleh BBC, Aung San Suu Kyi menolak dengan tegas adanya peningkatan kekerasan kepada etnis Rohingya, sebaliknya malah dibahas apabila buddhis juga telah diusir dan berada pada ketakutan besar selama ini (New York Times, 2017). Padahal dengan jelas terpampang korban etnis Rohingya jatuh begitu besar dibanding masyarakat budha, fakta tersebut berusaha diabaikan oleh Aung San Suu Kyi.

Di tahun 2015 ketika berlangsung kampanye pemilihan umum, Aung San Suu Kyi tidak menunjukkan sikap simpatinya kepada etnis Rohingya. Aung San Suu Kyi berusaha untuk tidak membahas mengenai kekerasan yang terjadi di Rakhine. Ketika Aung San Suu kyi disinggung mengenai Rohingya, Ia meminta para reporter untuk tidak berlebihan dalam isu tersebut (Barany, 2018:12). Setelah kemenangannya pada pemilu 2015, secara resmi Aung San Suu Kyi memiliki kuasa untuk menjalankan pemerintahan Myanmar sebagai pemimpin *de facto*. Sesaat

kemudian, melalui juru bicara Aung San Suu Kyi memberikan pernyataan mengejutkan yaitu, “*Membantu minoritas seperti etnis Rohingya adalah bukan prioritas kami*” (The Telegraph, 2015). Pada akhirnya kekerasan yang terjadi di Rakhine masih terus berlangsung hingga memuncak kembali lagi pada tahun 2017. Selama 2 tahun masa pemerintahan Aung San Suu Kyi, tidak ada kemajuan pembebasan penindasan etnis Rohingya. Pemimpin Myanmar tersebut, hanya diam hingga seluruh dunia hampir mengutuknya.

Akhir 2016, perwakilan PBB yang berada di Myanmar mendesak Aung San Suu Kyi untuk datang ke Rakhine demi misi kemanusiaan. Tetapi Aung San Suu Kyi tidak mau menjalankan perintah tersebut, salah satu juru bicaranya mengatakan apabila Aung San Suu Kyi tidak mau dianggap sebagai pengikut orang asing (The Washington Post, 2017). Setelah dinanti-nanti setelah mendapat desakan keras dari kecaman internasional, akhirnya Aung San Suu Kyi mengeluarkan pernyataan perdananya melalui pidato yang diadakan pada 19 September 2017 (The Washington Post, 2017). Dalam pidatonya Aung San Suu Kyi sama sekali tidak menyebut kata Rohingya namun sebaliknya menyebutnya dengan muslim Rakhine. Selanjutnya Ia juga menegaskan apabila pemerintahan dibawah Aung San Suu Kyi tidak takut dengan pengawasan dunia internasional. Sejalan dengan buka mulutnya pemimpin *de facto* Myanmar tersebut, menimbulkan kontroversi tersendiri karena tidak semua yang diucapkannya sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan.

Ditulis oleh Oliver Holmes yang dipublikasi oleh The Guardian mengungkap kebohongan dalam pidato Aung San Suu Kyi (The Guardian, 2017). Yang pertama adalah disorot mengenai pernyataan kondisi Myanmar yang damai sebelum ada serangan 25 Agustus 2017 oleh pemberontak. Fakta yang terjadi adalah sebelum terjadi serangan pada tanggal tersebut, tidak ada kondisi tenang dan damai seperti yang dilontarkan Aung San Suu Kyi. Ribuan orang harus mengungsi ke negara lain karena tidak dijamin kehidupannya oleh negara Myanmar.

Kedua adalah mengenai pernyataan apabila seluruh masyarakat Myanmar mengutuk segala bentuk pelanggaran HAM. Sayangnya, hal tersebut hanya keluar dari mulut manis Aung San Suu Kyi. Pemerintah dan mayoritas buddhis terang-terangan menyalahkan etnis Rohingya yang dianggap teroris tanpa melihat

tinakan pelanggaran HAM mereka kepada etnis Rohingya. Ketiga adalah penyebutan semenjak 5 September tidak ada konflik yang terjadi di Rakhine. Lagi-lagi yang diucapkan adalah kebohongan, karena dilihat dari Bangladesh hingga 5 September masih terdapat bentrokan antara etnis Rohingya dan aparat Myanmar.

Selanjutnya isi pidato yang cukup membuat kaget mengenai akses pendidikan di Rakhine tanpa diskriminasi karena semua orang disana berhak untuk memperoleh pendidikan. Menurut realitas adalah mayoritas etnis Rohingya tidak mendapatkan pelayanan publik seperti pendidikan karena mereka tidak memiliki kartu kependudukan. Pembahasan mengenai bantuan kemanusiaan juga cukup menggemparkan karena Aung San Suu Kyi menyatakan apabila Myanmar sudah membuka akses bantuan internasional ke Rakhine, tetapi melihat kejadian di lapangan para pemberi bantuan seperti PBB serta palang merah internasional kesulitan memasuki beberapa wilayah karena masih dilarang. Yang terakhir adalah mengenai akses terbuka bagi daerah yang sebelumnya dilarang untuk reporter dalam rangka peliputan kekerasan yang terjadi di Rakhine dikatakan dalam pidato oleh Aung San Suu Kyi, tetapi sayangnya akses yang diberikan sangat terbatas (The Guardian, 2017). Meskipun tidak semua apa yang dikatakan dalam pidato Aung San Suu Kyi bohong, tetapi hal tersebut malah makin membuatnya dikecam masyarakat internasional.

Apabila melihat keputusan Aung San Suu Kyi secara sekilas maka, hal tersebut memang berlawanan dengan perjuangan *non-violent movement* yang pernah dilakukan dulu. Ikonnya sebagai peraih nobel perdamaian internasional dipertanyakan. Tidak ada semangat menggelora untuk membebaskan penderitaan etnis Rohingya dari Aung San Suu Kyi. Namun dibalik keputusannya untuk bertindak diluar peraih nobel pasti memiliki alasan-alasan kuat yang melatarbelakangi dan perlu dianalisis.